



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. ANDI PURWANTO
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 252698

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.068.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 712 m2/370 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 2.527.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 623.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 470.250.000
4. Tanah Seluas 580 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 174.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 452 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 90.400.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/83 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 774.000.000
8. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA WAY KANAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.020.000.000



1. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTIGE CVT CKD Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY HATCHBACK 1,5L/RSCVT Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MAGH10R-BRXMBD 2.0 V HV CVT Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	306.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.052.681.836
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	8.447.831.836
III. HUTANG	Rp.	204.618.326
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.243.213.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.